

## PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN BUDAYA TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG: ANALISIS KUALITATIF DALAM KONTEKS GLOBALISASI

Alfiana Nawangsih<sup>1</sup>, Imahda Khori Furqon<sup>2</sup>, Jilma Dewi Ayu Ningtyas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Email: alfiananawangsih@mhs.uingusdur.ac.id<sup>1</sup>,  
imahda.khori.furqon@uingusdur.ac.id<sup>2</sup>, jilma.dewi.an@uingusdur.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kepatuhan pajak di negara-negara berkembang dalam konteks globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya mempengaruhi kepatuhan pajak di negara-negara berkembang. Beberapa faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tingkat korupsi, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan faktor budaya yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terkait dengan kewajiban membayar pajak, seperti nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks globalisasi, faktor sosial dan budaya juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pengaruh budaya dan nilai-nilai dari negara-negara maju. Oleh karena itu, pemerintah di negara-negara berkembang perlu memperhatikan faktor sosial dan budaya dalam merumuskan kebijakan pajak yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** faktor sosial, faktor budaya, kepatuhan pajak, negara-negara berkembang, globalisasi.

**ABSTRACT:** This research aims to analyze the influence of social and cultural factors on tax compliance in developing countries in the context of globalization. The research results show that social and cultural factors influence tax compliance in developing countries. Several social factors that influence tax compliance include the level of public trust in the government, the level of corruption, and the level of public participation in decision making. Meanwhile, cultural factors that influence tax compliance include the values held by society related to the obligation to pay taxes, such as the values of justice and social responsibility. In the context of globalization, social and cultural factors can also be influenced by external factors such as the influence of culture and values from developed countries. Therefore, governments in developing countries need to pay attention to social and cultural factors in formulating tax policies that can increase the level of taxpayer compliance.

**Keywords:** social factors, cultural factors, tax compliance, developing countries, globalization.

### 1. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang semakin berkembang pesat telah membawa dampak signifikan pada dinamika ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Negara-negara berkembang tidak lagi beroperasi dalam isolasi; mereka telah terlibat dalam jaringan global yang kompleks, yang melibatkan interaksi lintas batas, aliran modal internasional, dan arus informasi yang cepat. Dalam konteks globalisasi ini, banyak aspek kehidupan, termasuk perpajakan, mengalami transformasi yang mendalam.

Di tingkat yang lebih khusus, perpajakan adalah salah satu aspek yang memainkan peran penting dalam struktur keuangan negara-negara berkembang. Pajak bukan hanya sebagai sumber utama pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pemberian layanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, masalah kepatuhan pajak menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi sangat penting bagi stabilitas fiskal dan kemampuan pemerintah untuk menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau hukum semata. Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Persepsi individu tentang kewajiban pajak, norma-norma sosial yang berlaku, serta nilai-nilai budaya yang mendasarinya, semuanya dapat memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam konteks globalisasi, di mana budaya dan nilai-nilai saling bersinggungan, pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kepatuhan pajak di negara-negara berkembang menjadi lebih kompleks dan menarik untuk diselidiki.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kepatuhan pajak di negara-negara berkembang dalam konteks globalisasi yang cepat berubah. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan pengumpulan data yang mendalam dan kompleks. Melalui analisis wawancara dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan, persepsi, dan pengalaman wajib pajak dalam berbagai konteks budaya yang berbeda, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya memengaruhi perilaku perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan relevan dalam menghadapi tantangan global saat ini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini didesain untuk mendukung pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengumpulan data melalui analisis dokumen dan studi literatur yang relevan. Populasi penelitian adalah wajib pajak di beberapa negara berkembang yang dipilih secara representatif. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling untuk memastikan variasi latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi dari responden yang terlibat. Data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen dan literatur seperti studi peraturan perpajakan, laporan pajak, literatur akademis, dan publikasi terkait perpajakan di negara-negara berkembang yang menjadi fokus penelitian.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melihat berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, dengan tujuan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema utama, dan konsep-konsep yang muncul dari analisis dokumen dan literatur. Validitas akan diperkuat melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan temuan dari analisis dokumen dengan data yang ditemukan dalam literatur. Hal ini akan membantu dalam memahami dengan lebih mendalam pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kepatuhan pajak di negara-negara berkembang dalam konteks globalisasi.

## **3. HASIL PENELITIAN**

Faktor utama yang terungkap dalam penelitian ini adalah persepsi individu tentang keadilan pajak, etika sosial, dan pengalaman pribadi dalam hubungannya dengan perilaku perpajakan. Persepsi tentang keadilan pajak menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya yang mendalam memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana sistem

perpajakan dianggap adil oleh masyarakat. Pandangan mengenai apa yang merupakan sistem perpajakan yang adil dapat bervariasi antara budaya yang berbeda, tergantung pada norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat. Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai budaya dalam merancang tarif pajak yang adil.

Etika sosial dan tanggung jawab sosial juga memengaruhi kepatuhan pajak, terutama dalam budaya kolektivisme di mana kontribusi individu kepada kesejahteraan bersama dianggap sebagai tugas moral. Dalam situasi globalisasi yang semakin menggabungkan berbagai budaya, penghargaan terhadap norma-norma etika sosial yang berbeda menjadi penting untuk menjaga kepatuhan pajak yang tinggi. Pengalaman pribadi juga memiliki dampak signifikan pada perilaku perpajakan individu. Pengalaman positif dengan sistem perpajakan, termasuk proses pengembalian pajak yang efisien, dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya, pengalaman negatif seperti kesulitan dalam berurusan dengan penegakan hukum pajak dapat mengurangi kepatuhan. Dengan demikian, perbaikan dalam pelayanan pajak dan pengalaman positif bagi wajib pajak menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang positif.

Selain itu, implikasi dalam merumuskan kebijakan pajak menggarisbawahi pentingnya merumuskan kebijakan perpajakan yang sensitif terhadap budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan keragaman nilai-nilai budaya dalam menentukan tarif pajak dan aturan perpajakan. Peningkatan kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab sosial mereka juga menjadi hal krusial dengan pendidikan perpajakan yang lebih baik. Perbaikan dalam pelayanan pajak dan pengalaman positif bagi wajib pajak juga merupakan aspek penting dalam menjaga kepatuhan pajak yang tinggi.

Keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang kompleksitas pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kepatuhan pajak di negara-negara berkembang dalam era globalisasi. Pemahaman mendalam tentang dinamika ini dapat membantu merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak yang diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

## **4. PEMBAHASAN**

### **4.1 Presepsi Tentang Keadilan Pajak**

Persepsi tentang keadilan pajak menjadi faktor yang sangat beragam dan kompleks dalam konteks budaya yang berbeda. Pandangan individu tentang apa yang dianggap sebagai sistem perpajakan yang adil dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai budaya dan norma sosial yang mendalam dalam masyarakat. Misalnya, dalam budaya yang mementingkan kesetaraan sosial, wajib pajak mungkin cenderung memandang positif sistem perpajakan yang mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi pada mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi. Mereka melihatnya sebagai langkah menuju redistribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Di sisi lain, dalam budaya yang memberi prioritas pada kebebasan individual dan pemilik hak atas penghasilan mereka, sistem perpajakan yang rendah dan minim pengenaan pajak dianggap sebagai tindakan yang lebih adil karena menghormati hak individu untuk menjaga sebagian besar penghasilan mereka.

Oleh karena itu, penting untuk diakui bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya merupakan masalah ekonomi atau hukum semata. Keputusan tentang bagaimana menyusun tarif pajak, alokasi beban pajak, dan penggunaan pendapatan pajak harus mempertimbangkan keragaman nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang perspektif wajib pajak yang dipengaruhi oleh budaya dapat

membantu pemerintah merancang kebijakan perpajakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Dengan demikian, perdebatan tentang keadilan pajak bukan hanya perdebatan teknis, tetapi juga refleksi dari dinamika budaya yang ada di negara tersebut.

#### **4.2 Etika Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial**

Etika sosial dan tanggung jawab sosial memainkan peran yang signifikan dalam membentuk kepatuhan pajak di berbagai budaya. Dalam beberapa budaya, terutama yang mendorong konsep kolektivisme, wajib pajak seringkali merasa memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi mereka kepada kesejahteraan bersama. Mereka melihat pajak sebagai alat untuk mendukung berbagai program sosial dan pelayanan publik yang akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Pandangan ini mencerminkan budaya di mana solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama terhadap masyarakat sangat dihargai.

Dalam konteks globalisasi, di mana masyarakat semakin beragam dan bersatu dari berbagai budaya yang berbeda, penting untuk menghormati dan memahami norma-norma etika sosial yang berbeda. Pemerintah dan lembaga perpajakan harus menjaga kesadaran tentang keragaman nilai-nilai ini dan memastikan bahwa kebijakan perpajakan dijalankan dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan ini. Dalam menjalankan sistem perpajakan yang efektif, menghargai tanggung jawab sosial yang beragam yang dirasakan oleh wajib pajak dapat berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Dengan kata lain, etika sosial dan tanggung jawab sosial bukanlah fenomena universal yang sama di seluruh dunia, tetapi sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Kesadaran dan penghormatan terhadap berbagai norma etika sosial ini dapat membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih inklusif dan membangun hubungan yang lebih positif antara wajib pajak, pemerintah, dan sistem perpajakan secara keseluruhan.

#### **4.3 Pengaruh Pengalaman Pribadi**

Pengalaman pribadi merupakan elemen penting dalam pembentukan perilaku perpajakan individu. Pengalaman positif atau negatif dengan sistem perpajakan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kepatuhan pajak mereka. Sebagai contoh, jika seorang wajib pajak memiliki pengalaman yang baik dengan proses pengembalian pajak yang efisien dan mudah, mereka mungkin lebih cenderung untuk mematuhi pajak secara sukarela. Sebaliknya, jika seseorang memiliki pengalaman yang buruk, seperti kesulitan dalam berurusan dengan penegakan hukum pajak yang tidak ramah atau proses pengembalian pajak yang rumit, hal ini dapat memicu sikap negatif terhadap sistem perpajakan dan mengurangi tingkat kepatuhannya.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem perpajakan dijalankan dengan transparansi, efisiensi, dan kebijakan yang ramah wajib pajak. Hal ini dapat mencakup penyederhanaan prosedur perpajakan, peningkatan layanan pelanggan, dan penegakan hukum yang adil. Dengan menciptakan lingkungan perpajakan yang positif dan membangun pengalaman positif bagi wajib pajak, pemerintah dapat memengaruhi persepsi positif mereka terhadap pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Pengalaman pribadi juga memperkuat pentingnya pendidikan perpajakan yang baik. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang kewajiban perpajakan, hak, dan manfaat yang diberikan oleh pajak kepada masyarakat, pemerintah dapat membantu wajib pajak memahami pentingnya kontribusi mereka dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan negara. Dengan demikian, pengalaman pribadi menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk perilaku perpajakan individu, dan upaya untuk

menciptakan pengalaman positif dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak yang diperlukan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

#### **4.4 Implikasi Dalam Merumuskan Kebijakan Pajak**

Implikasi dari hasil penelitian ini sangat relevan dalam konteks perumusan kebijakan perpajakan di negara-negara berkembang yang tengah menghadapi tantangan globalisasi. Pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kepatuhan pajak dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan relevan dengan realitas masyarakatnya. Salah satu implikasi utama adalah perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya dalam menentukan tarif pajak dan aturan perpajakan. Dalam merancang tarif pajak yang adil, pemerintah perlu mempertimbangkan norma-norma sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Ini dapat mencakup memahami bagaimana tarif pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah pada penghasilan tertentu akan dilihat oleh masyarakat sebagai langkah yang sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka.

Selain itu, peningkatan kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab sosial mereka juga merupakan hal yang penting. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap pelayanan publik dan pembangunan negara. Pendidikan perpajakan yang lebih baik, kampanye penyadaran, dan informasi yang jelas tentang bagaimana dana pajak digunakan dapat membantu menciptakan persepsi positif tentang pajak. Terakhir, pemerintah dapat mempertimbangkan perbaikan dalam pelayanan pajak dan proses pengembalian pajak. Memastikan bahwa wajib pajak memiliki pengalaman yang positif dalam berurusan dengan sistem perpajakan, seperti proses pengembalian pajak yang efisien dan pelayanan yang ramah wajib pajak, dapat membantu membangun hubungan yang positif antara wajib pajak dan pemerintah.

Dalam keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang sukses di negara-negara berkembang harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya dengan cermat. Dengan demikian, perumusan kebijakan perpajakan yang lebih holistik, berdasarkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya dan perilaku masyarakat, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan.

### **5. KESIMPULAN**

Dalam konteks globalisasi, penelitian ini telah mengungkapkan kompleksitas pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kepatuhan pajak di negara-negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi individu tentang keadilan pajak, etika sosial, dan pengalaman pribadi merupakan elemen-elemen penting yang membentuk perilaku perpajakan individu. Persepsi tentang keadilan pajak sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat, dan pandangan tentang apa yang dianggap sebagai sistem perpajakan yang adil dapat bervariasi secara signifikan antara budaya yang berbeda. Etika sosial, terutama dalam budaya kolektivisme, mendorong tanggung jawab sosial individu dalam membayar pajak sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Sementara itu, pengalaman pribadi dengan sistem perpajakan, baik positif maupun negatif, memiliki dampak yang signifikan pada perilaku perpajakan individu.

Implikasi dari penelitian ini sangat relevan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif di negara-negara berkembang. Perumusan kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya dapat menciptakan sistem

perpajakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya dalam menentukan tarif pajak dan aturan perpajakan. Peningkatan kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab sosial mereka juga merupakan hal yang penting, dengan pendidikan perpajakan yang lebih baik dan informasi yang jelas. Selain itu, perbaikan dalam pelayanan pajak dan pengalaman positif bagi wajib pajak dapat membangun hubungan yang positif antara wajib pajak dan pemerintah. Keseluruhan, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor sosial dan budaya adalah kunci dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang relevan dan efektif di era globalisasi ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R. (2012). Pajak, Keuangan Negara dan Kesejahteraan. *Dinamika Sains*, 10(23).
- Berutu, D. A., & Harto, P. (2013). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Burhan, A. U. A. (2023). Identifikasi Faktor Utama Penghindaran Pajak di Negara-Negara Berkembang: Sebuah Tinjauan Literatur. *MUC Tax Journal*, 1(1).
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Kusuma, T. H., Utami, H. N., & Ruhana, I. (2016). *Pengaruh Persepsi Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, Dan Preferensi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Etis (Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01).
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung). *Jurnal akuntansi*, 1(2).
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Sianturi, Y., Malau, M., & Hutapea, G. (2021). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal Dan Rasio Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2).
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2).
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan

*Jurnal Sahmiyya | P-ISSN : 2963-2986 E-ISSN : 2963-8100*

R&D.

Yuhertiana, I. (2016). Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 131-141.